



Walhi Soroti Minimnya Pengawasan

WAHANA Lingkungan (Walhi) Yogyakarta menyoroti persoalan bangunan yang melanggar sempadan sungai dikarenakan terjadi pembiaran selama puluhan tahun. Pemerintah Kota (Pemkot) setempat juga tidak menegak-

kan aturan dan pengawasan secara intensif, sehingga ruang sempadan itu dilanggar. "Seharusnya untuk ruang sempadan sungai, penegakan dan pengawasan dilakukan sejak awal.

● ke halaman 14

Walhi Soroti Minimnya

● Sambungan Hal 13

Seharusnya sudah diantisipasi dengan larangan, namun karena ada pembiaran cukup lama hingga berpuh-puluh tahun prosesnya menjadi kian rumit," ujar Direktur Eksekutif Walhi Yogyakarta, Halik Sandera, kemarin.

Walhi pun menyarankan agar persoalan bangunan di sempadan sungai ini harus dimusyawarahkan dengan baik. Pemkot pun diminta memberikan cara persuasif agar ada ruang di sempadan yang bisa dimanfaatkan untuk mitigasi bencana, dan

aktivitas lainnya.

Disinggung ilegal atau tidaknya bangunan di kawasan bantaran sungai, Halik memandang problem ini tak lepas dari kemampuan ekonomi warga Yogya. Pada akhirnya, kata dia, warga memilih wilayah bantaran sungai karena keterbatasan kemampuan untuk memiliki rumah layak di Yogya. Apalagi, harga tanah kian mencekik.

"Kami tidak berbicara ilegal atau tidak warga yang tinggal di bantaran sungai. Karena, biasanya itu sesuai kemampuan mereka untuk tinggal di sana. Apalagi, perkembangan harga tanah di Yogya luar biasa," katanya.

Komunikasi dua arah antara pemerintah dengan warga

di bantaran sungai diperlukan. Misalnya, untuk konsep penataan bangunan rumah dengan meninggikan rumah menjadi vertikal ke atas. Selain itu juga akses jalan untuk ambulance dan damkar bisa masuk menjangkau kawasan bantaran sungai.

Halik memandang konsep penataan dengan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) masih belum sesuai dengan masyarakat Indonesia. Pasalnya, konsep rusunawa itu menimbulkan konflik sosial tersendiri bagi masyarakat yang ada di Indonesia dan khususnya di Yogyakarta.

Kesepakatan

Dia juga menyoroti penanganan bencana di kawasan

bantaran sungai terkesan lambat lantaran kewenangan sungai masih terpusat di Pemerintah Pusat. Walhi meminta ke depannya ada kesepakatan bersama atau *memorandum of understanding* (MoU) antara Pemerintah Kota (Pemkot) dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu opak (BBWSSO), sehingga penanganan menjadi lebih cepat.

"Untuk penanganan longsor ini memang ada kendala, karena harus ada koordinasi terlebih dahulu antara Pemkot dengan BBWSSO. Maka, harus ada kesepakatan bersama agar penanganan jauh lebih cepat, tanpa harus menunggu koordinasi," urai Halik. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005